

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmari, Amir, Syamsul A. 2014. Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik*, 2(3): 1-12.
- Andriani, Wiwik, Ermataty H. 2012. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri Padang). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 7(2) : 24-35.
- Anugerahani, Ika D, Sentot I.W. 2013. Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmu Manajemen, REVITALISASI*, 2(2) : 147-162.
- Ashari, Hasan, Noor C. M. 2013. *Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan)*. Jakarta: BPPK.
- Astuty, Elgia, Eva H.F. 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal Mahasiswa*, 1-19.
- Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2017. *Peta dan Pemangku Jabatan 2017*. Sidoarjo: BPKD.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2016. *Selayang Pandang 2016*. Sidoarjo: BPPD.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2009. *Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)*. Jakarta: BAPPENAS.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2000. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi Kelima. Jakarta: BPPK.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja*. Edisi Revisi. Jakarta: BPPK.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja*. Edisi Revisi. Jakarta: BPKP.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi Revisi. Jakarta: BPKP.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

- \_\_\_\_\_. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Darwanis, Sephi C. 2013. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 6(2) : 150-174.
- Friska, Indriani Y. 2015. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 1(1) : 75-81.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamidi, Fauji M. 2014. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1): 39-62.
- Hermawan, Asep. 2009. *Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Indonesia Pagi. "Sidoarjo Raih Juara 2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah". Diakses pada 20 Januari 2017 dari [www.surabayapagi.com](http://www.surabayapagi.com).
- JawaPos.com. 2017. "Evaluasi KemenPAN-RB, Integritas ASN Pemkab Sidoarjo Masih Rendah", diakses pada tanggal 22 Februari 2017 dari [www.jawapos.com](http://www.jawapos.com).
- Jogiyanto, HM. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Kadir. 2015. *Statistika Terapan: Konsep, Contoh, dan Analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mardiasmo, M. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nanda, Reza, Darwanis. 2016. Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1):327-340.
- Nidyatman, 2011. *Belanja Pegawai Setengah APBD*. Surabaya: Jawa Pos.
- Noordiatmoko, 2017. *Evaluasi KemenPAN-RB, Integritas ASN Pemkab Sidoarjo Masih Rendah*. Surabaya: Jawa Pos.

- Nordiawan, Dedi. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, Yohanes A. 2011. *Olah Data dengan SPSS*. Yogyakarta: PT. Skripta Media Creative.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Rudianto, 2009. *Penganggaran: Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran*. Jakarta: Erlangga.
- Sancoko, Bambang. 2008. *Kajian terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Sarwono, Jonathan, Hendra NS. 2016. *Prosedur-Prosedur Populer Statistik untuk Analisis Data Riset Skripsi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sembiring, Raissa A, Heni K. 2016. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi*. Hal: 1-15.
- Soraya, Gita, Rika, Cherrya. 2014. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Selatan. *Jurnal*, Hal 1-10.
- Sugianto, Rendi. 2014. Pendekatan dalam Proses Perencanaan dan Penyusunan ABK. *Jurnal: Jejaring Administrasi Publik*. Tahun VI, No. 2: 563-574.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.

- \_\_\_\_\_. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, VW. 2015. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sya'ban, Ali. 2015. *Teknik Analisis Data Penelitian Aplikasi Program SPSS dan Teknik Menghitungnya*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
- Tamasoleng, Adelstin. 2015. Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*. 3(1) : 97-110.
- Taufiqurrahman. 2014. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah: Tantangan dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Publik*. 6(2):511-519.
- Triuriana, Erwin A. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Kabupaten Jember). *Jurnal Artikel Penelitian Mahasiswa*. Jember: Universitas Jember.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wahyuni, Trisacti. "Penganggaran Berbasis Kinerja pada Kementerian/Lembaga: Masih Harus Banyak Berbenah", diakses pada tanggal 20 Januari 2017 dari [www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id).
- Wibisono, Seto. 2016. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(9):1-22.